



Perlu Komitmen Pemerintah Daerah

Tindak Lanjut

Rekomendasi

BPK Belum Optimal

PONTIANAK, SP - Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menerbitkan ragam rekomendasi yang berisi saran perbaikan atas berbagai temuan audit, termasuk yang berpotensi merugikan keuangan negara/daerah. Namun sayangnya, tindak lanjut atas rekomendasi dan temuan itu masih terbilang rendah.

Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Ida Sundari saat acara penyerahan hasil pemeriksaan atas paman-tauan kerugian negara/daerah



Dra Ida Sundari

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalbar

Sampai saat ini belum sepenuhnya diselesaikan. Sehingga perlu adanya komitmen dari para pemerintah daerah kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah.

dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II Tahun 2017 di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (16/1).

Ida menyebut, persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI oleh kabupaten/kota masih relatif rendah. Sampai dengan se-

• **Baca Halaman 15**



SUARA PEMRED/JAKA ISWARA
SERAHKAN - Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji menyerahkan hasil pemeriksaan atas pemantauan kerugian negara/daerah dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester II Tahun 2017 kepada Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar Ida Sundari di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Kalbar, Selasa (16/1).



Hal 9 ■ **tindak lanjut**

mester II tahun 2017, pihaknya telah menghasilkan 4.236 temuan dan 9.649 rekomendasi. Dari 14 kabupaten/kota di seluruh Kalbar, baru enam yang dicatat menindaklanjuti.

“Sampai saat ini belum sepenuhnya diselesaikan. Sehingga perlu adanya komitmen dari para pemerintah daerah kepada Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) untuk menyelesaikan kerugian negara/daerah,” terang Ida.

Berdasarkan pemantauan pihaknya terdapat beberapa hal yang menjadi penghambat penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK RI. Hambatan itu antara lain aparat pemerintah daerah belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi BPK RI sesuai ketentuan berlaku.

Kemudian, dokumen pendukung tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh entitas belum membuktikan adanya penyelesaian atas temuan pemeriksaan sesuai

rekomendasi BPK RI.

“Hambatan lain adalah Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) pada pemerintah daerah belum bekerja secara optimal. Monitoring dari Inspektorat juga belum optimal,” katanya.

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan tersebut, aparat pemerintah daerah diharapkan berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi. Menciptakan komunikasi yang baik dan efektif antara aparat pemerintah daerah yang diperiksa dengan Pemeriksa BPK RI.

Selain itu, peran TPKD pada pemerintah daerah mesti dioptimalkan agar Inspektorat Daerah secara proaktif melakukan monitoring penyelesaian tindak lanjut rekomendasi.

“Upaya selanjutnya adalah melalui penerapan sanksi yang tegas terhadap pihak yang tidak melakukan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan,” tukasnya.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Doddy Riyadmadji me-

ngatakan, tindak lanjut hasil pengawasan BPK merupakan hal mutlak sehingga mesti harus dipacu secara bersama-sama. Penyelesaian TLRHP adalah sebagai upaya membangun dan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).

Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus bersinergi dalam rangka penyelesaian TLRHP. Pemda dan BPK juga harus dapat saling bekerjasama dan bahu membahu mewujudkan *good governance*.

Doddy menginstruksikan Inspektorat Provinsi Kalbar untuk mengambil langkah koordinasi dengan pihak perwakilan inspektorat-inspektorat di 14 kabupaten/kota se-Kalbar.

“Ya, koordinasi intens kepada pihak perwakilan inspektorat di Kalbar maupun pusat,” tukasnya.

Mewakili pemerintah daerah, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie, menuturkan akan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik di

pemerintahan Provinsi Kalbar, khususnya Pemerintah Kota Singkawang.

“Kami akan berupaya meraih dan mempertahankan wajar tanpa pengecualian (WTP),” katanya usai menerima Laporan Hasil Peman-tauan (LHP) di Kantor BPKP Kalbar di Pontianak.

Menurut Tjhai Chui Mie, Kota Singkawang sendiri pada semester II telah menyelesaikan 82,11 persen rekomendasi. Penyelesaian tindak lanjut setiap tahun meningkat, meski belum seluruhnya terselesaikan.

“Namun pada semester II tingkat penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPKP Kalbar telah mencapai 80 persen,” katanya.

Meski demikian, dia tetap berkomitmen untuk menyelesaikan hasil LHP tersebut. Ia juga mengharapkan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah se-Kalbar agar semua rekomedasi dari BPK sebagai bahan perbaikan atas kinerja. (jek/ind)